

Hutan Desa Kalawa Terancam Rusak

Hutan Desa Kalawa di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, seluas 4.230 hektar terancam rusak akibat rehabilitasi saluran irigasi. Air di tanah dan lahan gambut di dalam hutan dikhawatirkan akan turun ke saluran irigasi dan menyebabkan kekeringan. Akibatnya, hutan akan mudah terbakar saat musim kemarau.

Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Kalawa Diwie U Tabat, Senin (5/5), di Pulang Pisau. Rencana awal, kata dia, kelompok tani mengusulkan pembersihan dan rehabilitasi jaringan pengairan yang lebarnya 3-4 meter sedalam 1,5 meter kepada Dinas Pekerjaan Umum Kalteng.

"Tetapi, kenyataannya, lebar irigasi ditambah menjadi sekitar 8 meter dengan kedalaman mencapai 3 meter. Ini berbahaya bagi hutan desa," kata Diwie.

Diwie mengatakan, hutan desa itu ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan tahun 2012 dan keputusan Gubernur Kalteng tahun 2013. Dari total 4.230 hektar, masih ada 627,14 hektar hutan asli dengan aneka macam pepohonan. Sisanya berupa belukar rawa sisa kebakaran hebat pada 1997.

"Lembaga Pengelola Hutan Desa Kalawa sedang berupaya untuk merehabilitasi area belukar rawa itu dan 12 hektar lahan telah ditanami 6.000 pohon karet. Jika irigasi diperlebar, tanah gambut akan kering dan rehabilitasi akan gagal," ujar dia.

Sidyu Talajan dari Humas Lembaga Pengelola Hutan Desa Kalawa mengatakan, pada 2 April lalu, pihaknya mengadu kepada Gubernur terkait pembangunan irigasi itu. Pada 22 April, Gubernur Agustin Teras Narang mengeluarkan surat kepada Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo untuk segera menindaklanjuti laporan itu.

"Meski telah keluar surat untuk menindaklanjuti surat dari Gubernur, aktivitas pembangunan irigasi masih tetap berjalan," kata Sidyu.

Menurut Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo, pihaknya telah menerima surat Gubernur dan kini dalam proses koordinasi dengan masyarakat dan Lembaga Pengelola Hutan Desa Kalawa untuk menindaklanjuti surat itu.

Pengelolaan gambut

Mengenai pengelolaan lahan gambut, guru besar riset dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Irsal Las, di Pekanbaru, Riau, menyatakan, pemerintah segera mengeluarkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gambut. Saat ini terdapat 23 peraturan menyangkut gambut yang sebagian isinya bersifat kontradiktif.